

BAB II

TINJAUAN MENGENAI TEORI YANG AKAN DIGUNAKAN

II.1. Tinjauan Pustaka

Manusia adalah perwujudan dari jiwa dan raga, jasmani dan rohani yang saling berkaitan satu dengan lainnya, pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan bahkan dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Dalam kehidupan bernegara, setiap warga negara juga membutuhkan pelayanan dari pemerintah atau birokrat sebagai pengendali kekuasaan yang dinamakan pelayanan publik.

Tahanan, Narapidana dan Anak Negara adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk mendapatkan derajat kesehatan optimal. Salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian yaitu keadaan kesehatan baik dalam arti fisik, mental maupun sosial. Perlakuan dan pelayanan kesehatan pada tahanan, narapidana ataupun anak negara dapat dipakai sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan dibidang hukum baik secara nasional maupun internasional.

Ada beberapa penelitian baik tesis maupun skripsi yang meneliti tentang pelayanan kesehatan di berbagai lembaga pemasyarakatan. Pada penelitian tesis Budi dengan judul "*Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan (studi kasus di lembaga pemasyarakatan Serang*". (Dasep Rana Budi, tidak diterbitkan). Hasil penelitiannya menyoroti tentang kekurangan-kekurangan sarana obat dan sarana lingkungan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Serang jauh lebih memadai sehingga terciptanya lingkungan kurang sehat di tambah dengan penyajian makanan yang kurang higienis, ini nampak bahwa setiap kamar penghuni masih terdapat kompor yang merupakan alat masak untuk makanan tambahan dari masing-masing narapidana walau pun itu ilegal.

Selanjutnya hasil penelitian skripsi Tarbiati dengan judul skripsi "*Implementasi Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Penderita TBC Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Bogor*". (R. Tarbiati. tidak diterbitkan) hasil penelitian skripsi ini yakni hanya memfokuskan

kepada narapidana yang menderita penyakit TBC, penyakit ini adalah penyakit yang sangat menular atau penyakit yang mudah sekali menular terhadap orang di sekeliling lingkungannya, pada penghuni di lembaga pemasyarakatan kelas II Bogor pada saat ini sangat over kapasitas setiap kamar nampak kotor sekali dan dipenuhi oleh orang-orang dengan kasus dan penyakit-penyakit yang berbeda.

Di lembaga Pemasyarakatan Bogor kekurangan tenaga medis bahkan ada beberapa pegawai medis yang tidak tetap, kurangnya saran dan prasarana yang menunjang terhadap pelayanan dan kesehatan khususnya untuk pengidap TBC, kondisi over kapasitas dapat menularkan penyakit TBC bahkan yang lainnya. Ada pun perbedaan dari dua skripsi di atas yang mana Dasep rana budi lebih menyoroti kesehatan lingkungan, sedangkan R.tarbiati hanya menekankan kepada narapidana yang menderita TBC dalam menerima pelayanan kesehatan.

1. Pengertian Administrasi Publik

Menurut Siagian dalam bukunya “ *Filsafat Administrasi* “
Pengertian administrasi adalah :

“ *Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.* “

Administrasi menurut Nawawi dalam bukunya yang berjudul Ilmu Administrasi adalah :

“ *Rangkaian kegiatan atau proses pengendalian cara atau sistem kerja sama sejumlah orang, agar berlangsung efektif dan Efesien dalam mewujudkan tujuan bersama.* “

Kata Administrasi secara *etimologis* bersumber dari bahasa Latin dari kata *ad* + *ministrase*, yang berarti melayani, membantu dan memenuhi untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

2. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. (Widodo, 2001, Hal 34)

Dalam pengertian lain tentang Pelayanan Umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik atau erat kaitannya dengan fungsi pemerintahan dalam rangka pemberdayaan atau pendidikan sosial kepada masyarakat yang menyangkut urusan ideologi, politik, sosial, budaya, agama dan pertahanan keamanan. Pelayanan publik menjadi tanggung jawab semua unsur yang terpadu dengan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dengan LSM, tetapi pada Negara berkembang pelayanan publik sangat dominan dilakukan oleh aparatur Negara.

Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk produk dari birokrasi pemerintahan yang bertindak sebagai organisasi publik. Kedudukan birokrasi adalah sebagai pelayan. Tugas pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terkecuali dan tidak membeda-bedakan antara masyarakat satu dengan yang lainnya, pelayanan tersebut diberikan secara gratis, walaupun dikenakan biaya harus seminimal mungkin agar masyarakat kecil mampu untuk mendapatkannya. (Kurniawan dan Puspitosari, 2007, hal 10 – 11).

Memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan harapan publik yang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, orientasi pada kekuasaan yang amat kuat selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari misinya untuk memberikan pelayanan publik. Birokrasi dan para pejabatnya lebih menempatkan dirinya sebagai penguasa daripada sebagai pelayan masyarakat. Akibatnya, sikap dan

perilaku birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik cenderung mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. (Dwiyanto,2006, hal.2)

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang "melayani" bukan yang "dilayani". Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya. Artinya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. (Sinambela)

Dalam kondisi demikian tentunya menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu alasan penting kehadiran pelayanan pemerintah, termasuk pelayanan publik yaitu diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat, jika layanan yang dibutuhkan itu ternyata tidak dapat dijangkau masyarakat atau disediakan oleh mekanisme pasar. Meluasnya peran pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan (publik) berkembang dengan munculnya paham atau pandangan tentang filsafat negara.

Adanya perluasan fungsi tersebut tidak lain adalah untuk kesejahteraan rakyat. Perluasan yang besar pada akhir-akhir ini dalam fungsi kesejahteraan itu telah memperlihatkan konsepsi baru tentang sifat pemerintahan. Konsepsi ini meletakkan pemerintahan dalam hubungan-hubungan yang lebih akrab dan kooperatif dengan manusia biasa sekaligus meruntuhkan tradisi pemerintahan sebagai suatu kekuasaan. Selain itu fungsi pelayanan yang dijalankan oleh Pemerintah saat ini sesungguhnya adalah untuk melayani masyarakat. (Rasyid, 1998)

Hal ini berarti pelayanan merupakan sesuatu yang terkait dengan peran dan fungsi pemerintah yang harus dijalanannya. Peran dan

fungsinya itu dimaksudkan selain untuk melindungi juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara luas guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Hamidi pelayanan umum (publik) yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah, secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu : pertama, pelayanan primer. Pelayanan primer adalah pelayanan yang paling mendasar atau dapat disebut juga pelayanan minimum, seperti : pelayanan kewarganegaraan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelayanan ekonomi. Kedua, pelayanan sekunder yaitu pelayanan pendukung namun sifatnya spesifik. Ketiga, pelayanan tersier yaitu pelayanan yang berhubungan secara tidak langsung kepada publik.

Pelayanan publik bisa dinilai oleh masyarakat / pengguna maupun konsumen ketika dapat merasakan apa yang telah didapat melalui media relasi yang terjadi antara pemberi dan penerima layanan. (Hamidi, 2006).

Pada dasarnya pelayanan publik adalah sangat sederhana, variabel pentingnya hanya ada pada pemberi dan penerima, namun kemudian menjadi rumit tatkala menyangkut pada aspek penilaian tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan. Secara konseptual untuk melaksanakan paradigma ini, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus dapat diukur, karena dengan adanya ukuran maka masyarakat bisa menilai kinerja pemberi layanan.

Menurut Effendi dalam widodo, 2001 pelaksanaan pelayanan publik yang baik, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah), dengan ciri sebagai berikut :

1. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran;
2. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan;
3. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai :
 - a. Prosedur/tata cara pelayanan;

- b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif
 - c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan;
 - d. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;
 - e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
4. Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta;
 5. Efisiensi, mengandung arti :
 - a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan;
 - b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.
 6. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
 7. Responsif, pelaksanaan pelayanan lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani;
 8. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang. (Effendi, 2001)

3. Pengertian Pelayanan Prima

Pelayanan Prima merupakan terjemahan dari istilah "*Excellent Services*" yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan yang terbaik. Disebut sangat baik atau terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan.

4. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat luas. Pelayanan kesehatan sendiri merupakan *merit goods*, yakni memiliki manfaat yang penting bagi masyarakat banyak dan penyediaannya tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada swasta. Beckerman menuliskan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa yang tergolong *merits goods* ini :

"once merits good are admitted into the proper sphere of public policy, it is obviously easy to show that most of them will not be consumed to socially optimal levels unless they are provided or financed by the public authorities in one way or another or made the subject of mandatory legislation".(Thamrin, "Kebijakan Pelayanan Perkotaan : studi kasus pelayanan air minum", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, bahan tidak diterbitkan, 1997).

Keterlibatan pemerintah tersebut tidak berarti pemerintah memproduksi secara langsung barang dan jasa, namun terdapat berbagai macam pilihan intervensi yang meliputi regulasi, subsidi, pajak dan sebagainya.

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan optimal. Menurut Levey dan Loomba, dalam *Health Care Administration a Managerial Perspective*, yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan (*promotif*), mencegah

(*preventif*) dan menyembuhkan penyakit (*kuratif*), serta memulihkan kesehatan perseorangan, kelompok ataupun masyarakat (*rehabilitatif*). (Azwar, *Pengantar Ilmu Administrasi Kesehatan*, 2002, hal 35.)

Secara umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan memiliki kesamaan, yakni setiap masalah kesehatan diselesaikan melalui penerapan kemajuan ilmu teknologi kedokteran serta kemajuan ilmu dan teknologi administrasi. (Azwar, hal. 1)

Penerapan kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran dilakukan melalui pemanfaatan berbagai pengetahuan dan keterampilan di bidang medis. Mulai dari pengetahuan dan keterampilan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis penyakit, sampai dengan tindakan pencegahan dan penyembuhan penyakit. Tujuan yang ingin dicapai dari penerapan kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran adalah penyelesaian berbagai masalah secara efektif. Artinya, semata-mata hanya ditunjukkan untuk mengatasi masalah kesehatan yang ditemukan, tanpa perlu mempertimbangkan tersedianya atau tidak tersedianya sumber daya. Sedangkan, tujuan yang ingin dicapai dari penerapan kemajuan ilmu dan teknologi administrasi adalah tercapainya efisiensi, melalui pertimbangan tersedianya sumber daya, yakni bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan serta mengawasi berbagai sumber tenaga, dana dan sarana yang tersedia, sehingga pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan

Pada saat ini berkat perkembangan ilmu dan teknologi, dan juga kehidupan masyarakat, bentuk dan jenis penyelenggaraan pelayanan kesehatan memiliki keragaman. Keragaman bentuk dan jenis pelayanan kesehatan ditentukan oleh :

1. Pengorganisasian pelayanan, apakah dilaksanakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi
2. Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi dari padanya

Sasaran pelayanan kesehatan, apakah untuk perseorangan, kelompok ataupun masyarakat secara keseluruhan. (Azwar. hal 36).

Sedangkan, menurut Hodgetts dan Cascio dari banyaknya variasi pelayanan kesehatan, secara umum pelayanan kesehatan sering dibedakan atas dua macam, yaitu pelayanan kedokteran (*medical service*) dan pelayanan kesehatan masyarakat (*public health service*). Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran ditandai dengan cara pengorganisasian yang bersifat sendiri (*solo practice*) atau secara bersama-sama dalam satu organisasi (*instution*), yang memiliki tujuan utama untuk mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan, sasaran pelayanannya terutama diperuntukkan bagi perorangan.

Sedangkan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan masyarakat umumnya diorganisir secara bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utama dari pelayanan kesehatan masyarakat adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, dan sasarannya adalah kelompok dan atau masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang utama adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama atau lebih sering disebut dengan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*). Pelayanan dasar ialah pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat pokok (*basic health service*). (hal. 41)

Pelayanan kesehatan dasar merupakan pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta memiliki nilai strategis dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan tersebut dilakukan bersama masyarakat dan ditulungpunggungi oleh tenaga medis, yakni dokter umum atau paramedis. Sedangkan WHO mendefinisikan pelayanan kesehatan primer adalah pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan agar dapat berlaku universal bagi perorangan atau keluarga. (Mcmahon, 1999, hal. 44)

Pelayanan kesehatan dasar mencakup pelayanan meningkatkan derajat kesehatan, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan makanan, olah raga, pengelolaan air limbah, pengelolaan

sampah, imunisasi, dan pengobatan dini terhadap penyakit. Dalam hal ini LAPAS sebagai penyelenggara pelayanan publik merupakan organisasi penyelenggaraan fungsi pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat (Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan).

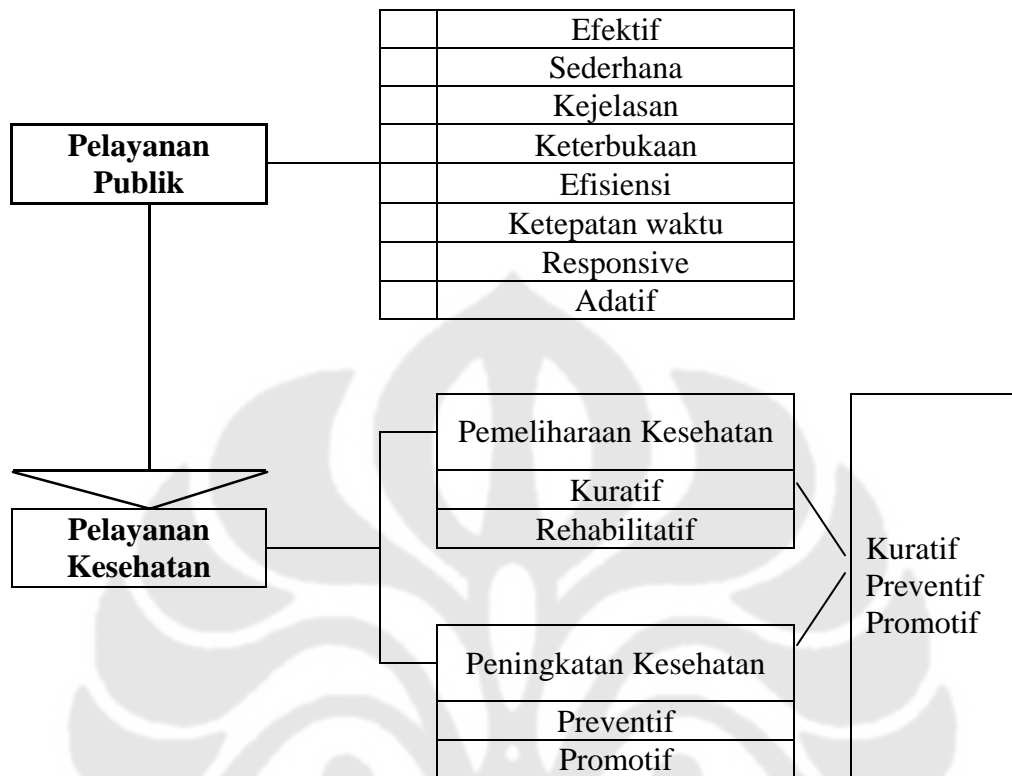
Upaya pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Hal ini berarti bahwa peningkatan kesehatan ini, baik kesehatan individu, kelompok atau masyarakat harus diupayakan. Upaya mewujudkan kesehatan tersebut, dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : pemeliharaan kesehatan dan peningkatan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan mencakup dua aspek yaitu : penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) . Sedangkan peningkatan kesehatan mencakup 2 aspek, yaitu : pencegahan penyakit (*preventif*) dan peningkatan kesehatan (*promotif*). Kesehatan perlu ditingkatkan karena kesehatan itu relatif dan mempunyai bentangan luas. Oleh sebab itu upaya kesehatan promotif ini mengandung makna bahwa kesehatan seseorang, kelompok, atau individu harus selalu diupayakan sampai tingkat yang optimal. (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1982, hal. 1)

Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan diwujudkan dalam suatu wadah pelayanan kesehatan yang disebut sarana kesehatan. Jadi sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu unit pelayanan fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembinaan peran serta masyarakat yang didalamnya terdapat bidang kesehatan, yang menyelenggarakan kegiataannya secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan pada suatu masyarakat tertentu yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. (Azwar, hal 199)

Pelayanan Kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan untuk kelancaran proses pemeriksaan di Pengadilan serta mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Bentuk kegiatan perawatan kesehatan bagi tahanan pada umumnya tentang pemeliharaan kesehatan bagi orang-orang terpenjara. Oleh karena itu upaya ke arah peningkatan kesehatan secara terarah dan berkesinambungan di LAPAS, perlu ditingkatkan melalui tindakan promotif dan preventif yang melibatkan berbagai institusi yang terkait. Diharapkan masalah-masalah kesehatan di LAPAS Klas I Tangerang dapat ditekan serendah mungkin

II.2. Kerangka Pemikiran

Gambar Kerangka Pemikiran



Menurut Siagian, dalam bukunya “ *Filsafat Administrasi* “
 Pengertian administrasi adalah :

“ *Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.* “

Administrasi menurut Nawawi dalam bukunya yang berjudul Ilmu Administrasi adalah :

“ *Rangkaian kegiatan atau proses pengendalian cara atau sistem kerja sama sejumlah orang, agar berlangsung efektif dan Efesien dalam mewujudkan tujuan bersama.* “

Kata Administrasi secara *etimologis* bersumber dari bahasa Latin dari kata *ad + ministrase*, yang berarti melayani, membantu dan memenuhi untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Publik adalah masyarakat umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator tetapi juga sekaligus kadang-kadang bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya. (Kencana, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta : Rineka Cipta, 1999)

Pada dasarnya pelayanan publik adalah sangat sederhana, variabel pentingnya hanya ada pada pemberi dan penerima, namun kemudian menjadi rumit tatkala menyangkut pada aspek penilaian tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan. Secara konsepsional untuk melaksanakan paradigma ini, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus dapat diukur, karena dengan adanya ukuran maka masyarakat bisa menilai kinerja pemberi layanan.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat luas. Pelayanan kesehatan sendiri merupakan *merit goods*, yakni memiliki manfaat yang penting bagi masyarakat banyak dan penyediaannya tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada swasta.

Beckerman menuliskan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa yang tergolong *merits goods* ini:

“once merits good are admitted into the proper sphere of public policy, it is obviously easy to show that most of them will not be consumed to socially optimal levels unless they are provided or financed by the public authorities in one way or another or made the subject of mandatory legislation”.(Thamrin, “Kebijakan Pelayanan Perkotaan : studi kasus pelayanan air minum”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, bahan tidak diterbitkan, 1997).

Bertitik tolak pada pengertian diatas maka Pelayanan Kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan untuk kelancaran proses pemeriksaan di Pengadilan serta mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Bentuk kegiatan perawatan kesehatan bagi tahanan pada umumnya tentang pemeliharaan kesehatan bagi orang-orang terpenjara. Oleh karena itu upaya ke arah peningkatan kesehatan secara terarah dan berkesinambungan di Lembaga

Pemasyarakatan, perlu ditingkatkan melalui tindakan promotif dan preventif yang melibatkan berbagai institusi yang terkait. Diharapkan masalah-masalah kesehatan di LAPAS Klas I Tangerang dapat ditekan serendah mungkin

Sesuai dengan pengertian pelayanan kesehatan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perawatan kesehatan tidak hanya dilakukan sebagai upaya penyembuhan terhadap orang sakit saja melainkan orang sehat pun juga perlu mendapatkan perawatan kesehatan dan semua itu diharapkan dilaksanakan di semua lapisan masyarakat atas sampai bawah, begitu juga tahanan, narapidana dan petugas.

Pelayanan publik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang di jalankan oleh seorang dokter, perawat dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan, yang bertugas sebagai pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Adapun pelayanan kesehatan yang dilakukan diantaranya adalah promotif yaitu usaha untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, preventif yaitu usaha untuk mencegah, kuratif yaitu usaha untuk menyembuhkan dan rehabilitative yaitu usaha untuk memulihkan. Akan tetapi dalam Lembaga Pemasyarakatan klas I Tangerang dalam pemberian pelayanan kesehatan terhadap narapidana hanya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif (penyembuhan), hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang, oleh karena itu hubungan antara pelayanan public dengan pelayanan kesehatan yang dijalankan kurang begitu baik dan tidak efektif dan efisien.